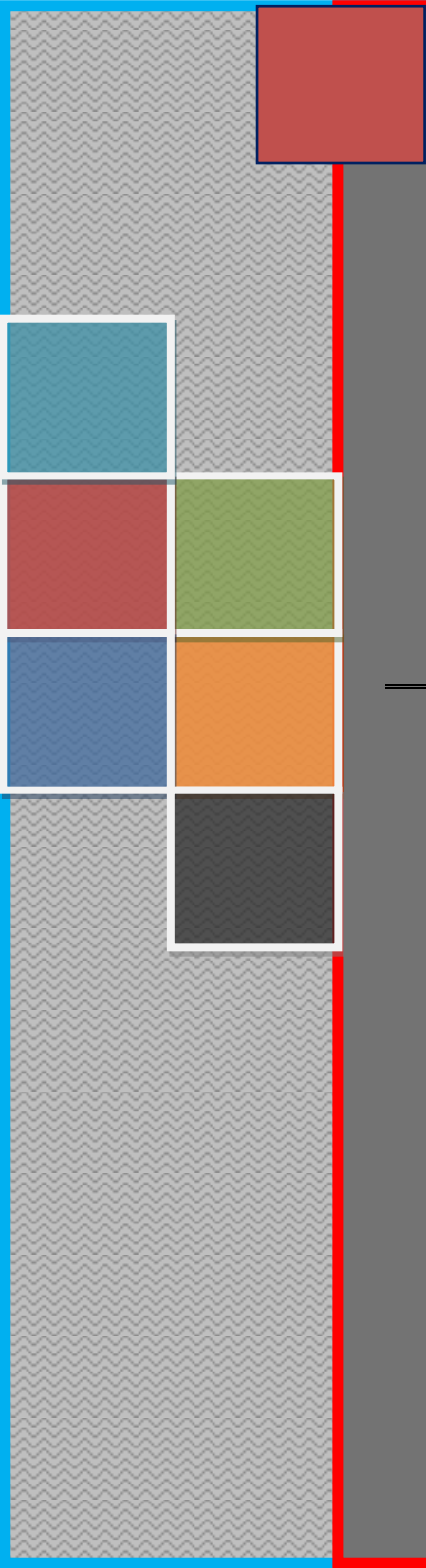




RENJA PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jalan Jenderal Sudirman
Kelurahan Weri
Telp. (0383) 21039
L A R A N T U K A



KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur memerlukan perencanaan secara matang dengan memanfaatkan penyerapan potensi sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dalam segala aspek kehidupan manusia. Perencanaan pembangunan harus disusun secara baik dengan melihat pada segala aspek kebutuhan masyarakat yang tercover dalam bingkai perencanaan pembangunan dengan memperhatikan referensi dari berbagai sumber usulan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan yang menjadi referensi dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP OPD) untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

Demikian sesungguhnya penyusunan dokumen renja perubahan ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Flores Timur khususnya pelayanan pada sektor transportasi di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Agustus 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ACHMAD R. DULI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	9
BAB IV PENUTUP.....	10
Daftar lampiran	
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024	
Tabel 2.2 Sebaran Program Kegiatan dan Pendanaan pada Renja Perubahan Tahun 2024	



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya beberapa asumsi yang mendasari perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah mengalami pergeseran akibat adanya perubahan lingkungan internal dan eksternal maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menghasilkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang baik dan bermutu, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program,

kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengarahkan pelaksanaannya dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

b. Ketua Pelaksana

- a. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- b. bertanggung jawab terhadap perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan Perangkat Daerah, serta bertanggung jawab terhadap teknis penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah PD;
- c. mengoordinasikan penyusunan, perumusan akhir materi dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- d. mengoordinasikan penyusunan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Renja PD pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

c. Sekretaris

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir penyusunan dan merampungkan materi akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. membantu Ketua Pelaksana dalam menyelesaikan administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Renja PD pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

d. Anggota

Membantu Ketua Pelaksana dalam urusan penyusunan dan perampungan materi Perubahan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan arahan dan pembagian tugas dari Ketua Pelaksana.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan penetapan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juli 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 219 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 JULI 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

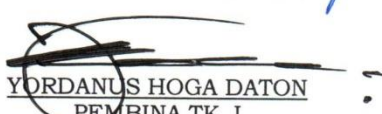
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Perangkat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi atau Pejabat Fungsional Perencana Perangkat Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional/ Staf Perangkat Daerah	Anggota

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 361 Nomor 86 Tahun 2010 tentang penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perubahan OPD tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan OPD Tahun 2024 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang target yang ingin dicapai dalam tahun 2024, arah kebijakan, program, kegiatan dan capaian kinerja yang penyusunannya berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. Sinkronisasi antara usulan prioritas dari masyarakat pada forum musrenbang kecamatan dipadukan dengan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai dasar penyusunan Renja Kerja OPD. Dokumen Renja OPD kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RKA Perubahan dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPA Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan berperan penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan Renstra OPD ke dalam rencana program dan kegiatan serta memuat pagu indikatif untuk masing-masing program yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perhubungan, sebagai bagian lanjutan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan karena memuat arah dan kebijakan pembangunan OPD selama 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan disusun berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Realistis untuk dilaksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah.
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- f. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.
- g. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- h. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan tahunan sektor Perhubungan pada tahun 2024.

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi rencana program dan kegiatan tahunan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- c. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra OPD sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Kinerja Kegiatan untuk pelaksanaan program sampai dengan Triwulan 2 pada urusan Perhubungan tahun anggaran 2024 dapat digambarkan untuk sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota dengan capaian kinerja kegiatan 16 % dan kinerja anggaran mencapai 47 %.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan capaian kinerja kegiatan 0,00 % dan kinerja anggaran mencapai 0,00 %
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja kegiatan 17 % dan kinerja anggaran mencapai 7 %
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan capaian kinerja kegiatan 0,00 % dan kinerja anggaran mencapai 0,00 %
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Capaian kinerja kegiatan mencapai 50% dan kinerja anggaran mencapai 65 %.
 - f. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan capaian kinerja kegiatan 30 % dan kinerja anggaran mencapai 45 %
 - g. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor dengan capaian kinerja kegiatan 0,00 % dan kinerja anggaran mencapai 0,00 %.
 - h. Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan capain kinerja kegiatan 25% dan kinerja anggaran mencapai 5 %.
 - i. Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota. Capaian kinerja kegiatan mencapai 21% dan kinerja anggaran mencapai 12%.

- j. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Capaian kinerja kegiatan mencapai 0.00% dan kinerja anggaran mencapai 0.00%.
 - k. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Capaian kinerja kegiatan mencapai 25% dan Capaian kinerja anggaran mencapai 12 %.
 - l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota. Capaian kinerja kegiatan mencapai 25% dan Capaian kinerja anggaran mencapai 22 %.
 - m. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan mencapai 0.00% dan Capaian kinerja anggaran mencapai 0.00 %.
2. Program Pengelolaan Pelayanan meliputi kegiatan-kegiatan yakni :
- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Capaian kinerja kegiatan mencapai 25% dan kinerja anggaran mencapai 21%.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten. Capaian kinerja kegiatan mencapai 18% dan kinerja anggaran mencapai 10%.
 - c. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja kegiatan mencapai 0.00% dan kinerja anggaran mencapai 49.60%.
 - d. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lalu Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/kota dan / atau jaringan jalur Kereta Api Kabupaten/kota dalam Daerah Kabupaten/kota dengan capaian kinerja 18 % dan kinerja anggaran mencapai 36 %.

- e. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan capaian kinerja 0.00 % dan kinerja anggaran mencapai 0.00 %.
- f. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan capaian kinerja 0.00 % dan kinerja anggaran mencapai 0.00 %.
- g. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan capaian kinerja 0.00 % dan kinerja anggaran mencapai 0.00 %.

Pencapaian kinerja pelayanan OPD sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

TABEL 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		REALISASI RENSTRA TAHUN 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2023(%)		unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
1					2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100 %		14 = 6+12		15 = 14/5*100 %		15
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						DINAS PERHUBUNGAN			100		-	-											-	-			-	-					
									100	35.607.5 34.030	100	5.304.64 1.027	100	5.894.1 31.929		971.00 8.399		1.547.3 11.435						2.482.4 20.834	100 0	42 %		7.787.0 61.861	100 0%	22 %	DISHUB		

2	15	01			Meningkatnya pelayanan Kegiatan Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	15.819.362.092	100	3.391.680.284	100	3.756.184.783	905.173.899	1.348.375.035					2.253.353.934	100	100	5.645.034.218	100%	36%		
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100			100										100	100		100%			
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100			100										100	100		100%			
							Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100			100										100	100		100%			
2	15	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	311.227.544	100	102.032.650	100	49.998.614	5	9.821.000	2	12.481.000		7	22.302.000	100	45%	107	124.334.650	107%	40%	DISHUB
2	15	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	8	75.000.000	2	39.914.000	2	14.999.286	2	2.331.000		8.131.000		2	10.462.000	2	70%	4	50.376.000	50%	67%	

2	15	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	75.000.000	2	11.994.950	2	9.999.910									2	11.994.950	25 %	16 %			
2	15	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	15	95.000.000	6	27.769.650	3	9.999.742	3	7.490.000				3	7.490.000	6	75 %	9	35.259.650	60 %	37 %		
2	15	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	66.227.544	4	22.354.050	4	14.999.676		2	4.350.000				2	4.350.000	4	29 %	6	26.704.050	38 %	40 %	
2	15	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	10.770.912.643	100	2.691.661.095	100	3.155.575.898	5	812.048.899	11	1.194.738.435				16	2.006.787.334	100 %	116	4.698.448.429	116 %	44 %	DISHU B
2	15	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14	10.450.912.643	14	2.631.669.495	14	3.080.590.476	3	802.998.899	6	1.172.113.435				9	1.975.112.334	64 %	23	4.606.781.829	164 %	44 %	

2	15	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	135.000.000		12	60.000.000	2	9.050.000	5	22.625.000					7	31.675.000	12	53%		31.675.000		23%	
2	15	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	45.000.000	12		45.000.000										12			45.000.000	100%	100%		
2	15	01	2.02	0005		Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)	8	15.000.000																				
2	15	01	2.02	0007		Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan bulanan /triwulan / semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keungan bulanan/triwulan/ semester SKPD (laporan)	8	125.000.000	2	14.991.600	1	14.985.422									2			14.991.600	25%	12%		
2	15	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah(%)	100	50.000.000		100	29.998.402	3	6.060.000							3	6.060.000	100	20%		6.060.000		12%	DISHU B

2	15	01	2.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	3	15.000.000			1	9.999.854	1	4.800.000					1	4.800.000	1	48%		4.800.000		32%	
2	15	01	2.03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	20.000.000			6	9.999.648															
2	15	01	2.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	15.000.000			6	9.998.900	2	1.260.000					2	1.260.000	2	13%		1.260.000			
2	15	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	192.800.000	3	51.672.500	100	14.999.050		4.000.000		7.745.000				11.745.000	4	78%		63.417.500			DISHU B
2	15	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakian dinas beserta atribut kelengkapannya(Paket)	1	72.800.000	1	24.607.500																	

2	15	01	2.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	36	20.000.000			12	4.999.050																
2	15	01	2.05	0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	36	20.000.000			12	10.000.000	4	4.000.000	7.745.000					11.745.000	4	117%						
2	15	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan peletihan(Oran g)	4	80.000.000	2	27.065.000																		
2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	256	595.000.000	100	181.626.080	100	149.483.389		7.532.000	30.351.600					37.883.600	256	25%	100	219.509.680	39%	37%	DISHU B	
2	15	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	20.000.000	5	1.969.000	5	4.940.477			79.000							5	1.969.000	25%	10%			
2	15	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	25.000.000	1	19.995.500	1	4.996.500		365.000	665.000					1.030.000	1	21%	1	21.025.500	25%	84%		

2	15	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	8	25.000.000	2	7.498.000	2	4.987.055	510.000		545.000						1.055.000	2	21%	2	8.553.000	25%	34%	
2	15	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	80.000.000	1	29.837.600	2	12.498.150	3.005.000		3.875.000						6.880.000	2	55%	1	36.717.600	25%	46%	
2	15	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	50.000.000	2	24.999.900	2	4.999.680	500.000		505.600						1.005.600	2	20%	2	26.005.500	25%	52%	
2	15	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan(Dokumen)	1	15.000.000														0%						
2	15	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	26.200.000	12	14.993.000	12	7.480.000	1.087.000		1.447.000						2.534.000	12	34%	12	17.527.000	25%	67%	
2	15	01	2.06	0009		Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	315.000.000	12	82.333.080	12	99.999.915	2.065.000		23.235.000						25.300.000	12	25%	12	107.633.080	25%	34%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	15	02	2.04	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara n dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggara n dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota (laporan)	12	200.000.000	2	13.435.000	3	49.988.500	1.130.000						-	1.130.000	3	2%	2	14.565.000	17%	7%	
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendraan Bermotor (Unit)	122	2.916.993.282		54.743.700	108	106.820.680	2.279.500	28.343.400					30.622.900	122	29%		85.366.600		3%	DISHU B	
2	15	02	2.05	0001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasaranan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	6	2.350.000.000			3	15.000.000									0%						
2	15	02	2.05	0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8	236.722.714			2	51.821.020		23.026.400							0%						
2	15	02	2.05	0003		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar (unit)	100	140.000.000	100	54.743.700	100	24.999.780	2.279.500	5.317.000				7.596.500	100	30%	100	62.340.200	100%	45%			

2	15	02	2.05	0004		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Unit)	2	100.000.000																		
2	15	02	2.05	0005		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	6	90.270.568			3	14.999.880														
2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a (Laporan)	49	825.000.000		39.060.000	12	34.996.350							49			39.060.000			5%	DISHU B
2	15	02	2.06	0001		Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabuipaten/Kota	Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa laulintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (laporan)	48	725.000.000	12	39.060.000	12	34.996.350									12	39.060.000	25 %	5%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota. (laporan)	4	375.000.000	1	67.174.000	1	24.999.590	640.000	14.000.000						14.640.000	1	59%	1	81.814.000	25%	22%	
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	50.000.000			1	24.995.100								1							DISHU B
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota (Dokumen)	2	50.000.000			1	24.995.100															

2	15	03			Meningkatnya sarana dan Prasarana transportasi laut dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)	85.5%	5.454.592.311		174.439.543	30,5	221.560.080		10.030.000		50.484.000						48.785.000	22%		223.224.543		4%	DISHUB	
2	15	03	2.01			Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)	102	302.000.000	46	39.724.000	102	39.917.874		2.060.000								2.060.000	102	5%	46	41.784.000	45%	14%	DISHUB
2	15	03	2.01	0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	34	102.000.000	34	19.759.000	34	19.989.150		2.060.000								2.060.000	34	10%	34	21.819.000	100%	21%	

[illegible]

2	15	03	2.07	0003		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	2	80.000.000	2	19.951.300	2	19.932.974									2		2	19.951.300	100%	25%	
2	15	03	2.07	0004		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujui nya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)	22	200.000.000	4	24.967.243	22	71.712.112	7.970.000							46.725.000	22	65%	4	71.692.243	18%	36%	
2	15	03	2.08			Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Pelayanan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)	18	273.750.000	9	64.081.000											18		9	64.081.000	50%	23%	DISHUB

2	1 5	0 3	2. 08	00 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	9	150.000. 000	9	64.081.0 00									9	9	64.081. 000	10 0%	43 %	
2	1 5	0 3	2. 08	00 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)	9	123.750. 000																
2. 15	0 3	2	10			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(D LKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(D LKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	300.000. 000		4	39.997. 200								4					DISHU B

[illegible]

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sejak awal tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program urusan. Sementara kegiatan serta sub kegiatan yang menyebar pada secretariat dan bidang urusan perhubungan darat dan bidang perhubungan laut dengan dukungan sejumlah anggaran.

Namun dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan ditemukan berbagai kendala yang berpotensi menghambat progres pencapaian program dan kegiatan.

Hal tersebut menjadi dasar dilakukannya perubahan rencana kerja dari rencana sebelumnya sehingga berdampak pada ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 hanya meliputi 3 (tiga) program dan 21 kegiatan dan 48 Sub kegiatan dengan pagu perubahan sebesar Rp. 6.035.432.203 dari pagu sebelum perubahan Rp. 4.810.528.852. Perubahan rencana kerja dimaksud berserta penjelasannya hanya meliputi kegiatan yang mengalami perubahan :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota, mengalami penambahan anggaran untuk pemasangan lampu penerangan demi mendukung kegiatan festival di Desa Peledo dusun meko.
 - 2) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan penyusunan Peraturan Daerah yang mana Honorarium Tim dari Kemenkukham Provinsi NTT dan Tim Pemerintah Daerah belum dianggarkan sehingga ada penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.

2. Program Pengelolaan Pelayaran.

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten /Kota, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran untuk perawatan dan perbaikan Kapal Milik Pemerintah Daerah.
- 2) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal, kegiatan ini juga mengalami penambahan anggaran untuk perbaikan Movable Bridge (MB) Pelabuhan Penyeberangan Deri Kecamatan Ile Boleng

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Rumusan rencana program / kegiatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur disajikan pada tabel Rancangan renja perubahan tahun 2024 dengan sebaran anggaran pada seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 3.1

TABEL 3.1

Perubahan rancangan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif tahun 2024

DINAS PERHUBUNGAN

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG ANGGARAN) (Rp)	SUBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			PN	PD
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DINAS PERHUBUNGAN											
							100	4.810.528.852			6.035.432.203		1.224.903.351			

2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	3.218.707.389			3.701.121.437		482.414.048			
						<i>Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)</i>	100									
						<i>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>	100									
						<i>Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>	100									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)</i>		20.000.000			65.539.114		45.539.114			
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	2	14.999.286	Flores Timur	9.999.286	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dokumen)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	2	14.999.910	Flores Timur	9.999.910	Dana Tranfer Umum - DAU		

2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	5.000.000	Flores Timur	3	9.999.742	Flores Timur	4.999.742	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	5.000.000	Flores Timur	4	25.540.176	Flores Timur	20.540.176	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		2.756.730.974			3.100.740.138		344.009.164			
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14 bulan	2.690.930.974	Flores Timur	14	3.025.754.716	Flores Timur	334.823.742	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	60.800.000	Flores Timur	12	60.000.000	Flores Timur	- 800.000	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semester SKPD (laporan)	2	5.000.000	Flores Timur	2	14.985.422	Flores Timur	9.985.422	Dana Transfer Umum - DAU		

2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah(%)		15.000.000			29.998.402		14.998.402			
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)</i>	6	5.000.000	Flores Timur	6	9.999.854	Flores Timur	4.999.854	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	5.000.000	Flores Timur	6	9.999.648	Flores Timur	4.999.648	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	5.000.000	Flores Timur	6	9.998.900	Flores Timur	4.998.900	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		6.000.000			14.999.050		8.999.050			
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	3.000.000	Flores Timur	12	4.999.050	Flores Timur	1.999.050	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	3.000.000	Flores Timur	12	10.000.000	Flores Timur	7.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU		

2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		199.600.000			166.877.258		- 32.722.742			
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	5	5.000.000	Flores Timur	5	6.931.466	Flores Timur	1.931.466	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	5.000.000	Flores Timur	1	4.996.500	Flores Timur	- 3.500	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	2	4.987.055	Flores Timur	- 12.945	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	12.500.000	Flores Timur	1	22.494.150	Flores Timur	9.994.150	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	2	4.999.680	Flores Timur	- 320	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12	7.500.000	Flores Timur	12	17.480.000	Flores Timur	9.980.000	Dana Tranfer Umum - DAU		

2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	150.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta, Luar Wilayah	12	99.999.595	Larantuka, Kupang, Jakarta, Luar Wilayah	- 50.000.405	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Flores Timur	1	4.988.812	Flores Timur	- 11.188	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	4.600.000	Flores Timur	-	-	Flores Timur	(4.600.000)	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah		5.000.000		-	-		- 5.000.000			
2	15	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000	Flores Timur	-	-	Flores Timur	(5.000.000)	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		94.076.415			195.719.250		101.642.835			
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.076.415	Flores Timur	12	1.979.250	Flores Timur	- 97.165	Dana Transfer Umum - DAU		

2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	20.000.000	Flores Timur	12	24.690.000	Flores Timur	4.690.000	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	72.000.000	Flores Timur	12	169.050.000	Flores Timur	97.050.000	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		122.300.000			127.248.225		4.948.225			
2	15	01	2.09	0002	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	15	98.300.000	Flores Timur	14	108.293.350	Flores Timur	9.993.350	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	2.000.000	Flores Timur	20	2.000.000	Flores Timur	-	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	2	2.000.000	Flores Timur	26	1.984.500	Flores Timur	- 15.500	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	2	20.000.000	Flores Timur	4	14.970.375	Flores Timur	(5.029.625)	Dana Tranfer Umum - DAU		

2	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			1.591.821.463			2.334.310.766		742.489.303			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)	52	1.406.821.463		44	2.008.100.686		601.279.223			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota (Unit)		1.000.000.000			1.549.997.701		549.997.701			
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)	80	1.000.000.000	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Adonara, Adonara Tengah, Ile Boleng, Kelu bagolit dan Witiham	40	1.549.997.701	Dalam Kota Larantuka	549.997.701	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Peningkatan Fungsi Terminal Tipe C		30.000.000			29.999.685		- 315			

2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)	1	30.000.000	Larantuka (Terminal Weri)	3	29.999.685	Larantuka	- 315	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen persyaratan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		50.000.000			38.211.500		- 11.788.500			
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota (laporan)	1	50.000.000	Kec. Larantuka, Wulanggitan g.Adonara Barat, Tanjung Bunga	3	38.211.500	Luardae rah, Flores Timur	(11.788.500)	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Unit)		106.821.463			128.538.600		21.717.137			
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	9	15.000.000	Larantuka (Kel.Weri)	1	15.000.000	Larantuka	-	Dana Tranfer Umum - DAU		

2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	51.821.463	Denpasar Bali, Luar Wilayah	2	61.820.520	Denpasar	9.999.057	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar (unit)	100	25.000.000	19 Kec. Kabupaten Flores timur	100	36.718.200	Larantuka	11.718.200	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	15.000.000	Flores Timur	2	14.999.880	Larantuka	- 120	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)		25.000.000			46.769.450		21.769.450			
2	15	02	2.06	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (laporan)	12	25.000.000	Larantuka	12	46.769.450	Larantuka	21.769.450	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota (Laporan)		25.000.000			24.998.500		- 1.500			

2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.(Laporan)</i>	12	25.000.000	Larantuka	14	24.998.500	Larantuka	- 1.500	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)</i>		100.000.000			119.590.800		19.590.800			
2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1	100.000.000	Flores Timur	1	119.590.800		19.590.800	Dana Transfer Umum - DAU		
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan tingkat penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota (Laporan)</i>		45.000.000			44.999.350		- 650			

2	15	02	2.14	0001	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik(laporan)	1	20.000.000	Flores Timur	42	19.999.760	- 240	Dana Tranfer Umum - DUA		
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.(laporan)	12	25.000.000	Flores Timur	1	24.999.590	Luar Daerah, Larantu ka - 410	Dana Tranfer Umum - DUA		
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pelayanan AngkutanPerkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		25.000.000			24.995.100	- 4.900			
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota (Dokumen)	1	25.000.000	Flores Timur	1	24.995.100	Larantu ka (4.900)	Dana Tranfer Umum - DUA		

2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)</i>	25,5	185.000.000		25,5	326.210.080		141.210.080			
2	15	03	2.01		Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)</i>	24	40.000.000			39.917.874		- 82.126			

2	15	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	<i>Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)</i>	12	20.000.000	Flores Timur	34	19.989.150	Luar Daerah, Larantuka	- 10.850	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten.	<i>Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)</i>	12	20.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	68	19.928.724	Luar Daerah, Larantuka	- 71.276	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	<i>Jumlah Laporan Data dan informasi pelayanan angkutan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota (Laporan)</i>		55.000.000			141.645.086		86.645.086			

2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	2	20.000.000	Flores Timur	2	19.932.974	Larantu ka,Adon ara,Solo r	(67.026)	Dana Tranfer Umum - DAU		
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)	4	35.000.000	Flores Timur	22	121.712.112	Larantu ka,Adon ara,Solo r	86.712.112	Dana Tranfer Umum - DAU		
2.15	03	2	10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)		40.000.000			39.997.200		- 2.800			

2.15	03	2	10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	20.000.000	Flores Timur	2	19.998.600	Luar Daerah, Larantuka	- 1.400	Dana Tranfer Umum - DAU		
2.15	03	2	10	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	20.000.000	Flores Timur	2	19.998.600	Flores Timur	(1.400)	Dana Tranfer Umum - DAU		
2.15	03	2	12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)		50.000.000			104.649.920		54.649.920			
2.15	03	2	12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)	12	50.000.000	Adonara(Pelabuhan Deri) Solor (Pelabuhan Lohayong)	22	104.649.920	Larantuka, Adonara, Solor	54.649.920	Dana Tranfer Umum - DAU		

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan yang memuat program dan kegiatan serta pagu anggaran yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Renja Perubahan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKA) OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Secara rinci, Renja perubahan memuat tentang program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan, yang mengacu pada agenda pembangunan yang termuat dalam Renstra OPD sehingga dalam implementasinya diharapkan dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Fokus utama Renja perubahan ini diarahkan pada peningkatan sarana prasarana transportasi melalui penyediaan perlengkapan jalan dan pelayanan umum transportasi kepada masyarakat.

Akhirnya, dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam pelaksanaannya Renja perubahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Larantuka, Agustus 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ACHMAD R. DULI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

